

DEMOKRASI PESANTREN : MENEBAR FORMAT POLITIK YANG DAMAI

Oleh : H. Imam Yahya *)

ABSTRACT :

Dalam bahasa KH Abdurrahman Wahid, Pesantren merupakan sebuah sub kultur budaya masyarakat Indonesia. Kyai sebagai pengasuh Pesantren menjadi tokoh sentral tidak saja sebagai pengelola Pesantren tetapi Kyai juga sebagai tokoh dan panutan masyarakat Pesantren. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Kyai di Pesantren bagaikan Raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan penuh atas masyarakat yang memberikan mandat kepadanya. Namun dalam dunia politik ketokohan Kyai tidak bisa disamakan dalam posisinya sebagai tokoh Pesantren. Hal ini bukan karena Kyai tidak layak untuk menjadi panutan dalam berpolitik, tetapi dalam dunia politik, Pesantren menggunakan perspektif sunni, di mana kekuasaan adalah kewajiban kelompok (*fardu kifayah*), sehingga politik dijadikan sebagai wasilah/media bukan *ghoyah*/tujuan dalam rangka mencapai kemashlahatan ummat.

Banyaknya praktek politik yang mengatasnamakan politik Islam seperti khilafah Islamiyah di timur tengah semacam al-Qaedah, ISIS dan sejenisnya, menjadikan kesan politik Islam yang arogan dan menakutkan. Sementara berpolitik ala pesantren mencerminkan politik Islam yang penuh kedamaian dan persahabatan.

Keywords : pesantren, perdamaian, politik Islam,.

*)Penulis adalah dosen Fiqh Siyash/Ilmu Politik pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

A. PENDAHULUAN

Pesantren merupakan sistem pendidikan tradisional di Indonesia yang paling *genuinedan* mampu bertahan hidup hingga sekarang ini. Tentu saja ini bukan sekedar proses alami, tapi pesantren memang memiliki elemen-elemen sub-kultur yang unik dan khas bersiri khas bangsa Indoneisa.

Salah satu keunikan lembaga ini adalah independensinya yang kuat. Ia bebas dari segala bentuk intervensi luar. Lembaga ini, pada tingkat tertentu, bisa menjadi salah satu contoh *self-governing school*—sekolah yang memilki otonomi yang kuat. Kyai dengan leluasa mengekspresikan ide-idenya dalam menjalankan semua aktifitas Pesantren dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan santri. Untuk menjaga independensi ini, Pondok menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansial. Pesantren juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi para santri, agar mereka dapat mandiri segera setelah selesai belajar, tanpa tergantung pada orang lain termasuk pemerintah. Keterampilan dasar yang biasa diberikan adalah, misalnya, perdagangan, industri rumah tangga, dan berbagai kegiatan yang mendatangkan *income*.

Keunikan lainnya nampak dari otonominya, seperti otonomi materi pengajaran (kurikulum), cara penyampaian materi pengajaran (metode), tempat (lokasi) pengajaran dan sebagainya. Titik sentral otonomi itu terletak pada figur kiai, sehingga kemampuan kiai-lah yang akan menentukan “merah-hijau”-nya pesantren. Sementara di sisi yang lain, para santri mempunyai ketundukan yang luar biasa terhadap sang kiai. Kiai bukan saja berfungsi sebagai *transmitter* ilmu-ilmu keagamaan tradisional tapi juga sebagai pembimbing spiritual.

Kenyataan seperti tersebut menimbulkan banyak kritik, terutama di tengah dunia yang terus berubah. Pesantren dianggap tertutup, otoriter, tidak demokratis karena kiai adalah segala-galanya. Kritik-kritik semacam ini tentu saja bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang berangkat dari realitas yang dapat diindera, meskipun terkadang realitas yang nampak belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan pesantren.

Seiring dengan perkembangan zaman, wajah pesantren yang kebanyakan tumbuh berkembang di masyarakat agraris sebagai komunitas masyarakat yang mandiri, tidak lagi mampu bertahan di tengah terpaan angin demokratisasi. Tak sedikit pesantren-pesantren yang terjun ke dunia politik dengan berbagai argument yang beragam.

B. PARTISIPASI POLITIK DALAM ISLAM :

Partai politik secara etimologis berasal dari kata partai dan politik. Kata "partai" berasal dari bahasa Inggris "part" yang berarti menunjuk kepada sebagian orang yang seazas, sehaluan, dan setujuan terutama di bidang politik. Sedangkan politik yang dalam bahasa Inggris *politics* berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan, atau seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan.¹

Jadi partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seideologi atau tempat/wadah penyaringan dan pembulatan, serta

¹BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal. 144-5.

tempat berkumpulnya orang-orang yang seide, cita-cita dan kepentingan.²

Para ahli politik seperti PJ. Bouman, Carl J. Friedrich, dan Mac Iver³ juga mengartikan partai politik sebagai: sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat iduil maupun materiil.

Secara umum dapat dikatakan, partai politik adalah suatu kelompok yang teorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.⁴

Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk dari berbagai kegiatan yang dilakukan partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan seperti turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik baik secara langsung atau tak langsung, kegiatan memilih dalam pemilihan umum, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil

²Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hal. 209. Juga dalam Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Dan Politik*, cet ke 2. Bandung: PT. Eresco, 1981. hlm. 100.

³Robert Mac Iver, *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1955, hlm. 397

⁴PJ.Bouman, *Sosilogi, Pengertian dan Masalah*, terj. Sugito dan Sujitno, Jakarta: Yayasan Pendidikan Masyarakat, 1959, hlm. 65, , Robert Mac Iver, *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1955, hlm. 397.

rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.

Dalam kepustakaan ilmu politik, ditemukan beberapa definisi yang berbeda mengenai partai politik. Namun ilmuwan politik tersebut tidak menyertakan aspek ideologi dalam menyusun definisi partai politik. Ramlan Surbakti menduga, hal itu disebabkan oleh pengaruh pandangan di Barat bahwa ideologi telah mati. Padahal pada kenyataannya setiap negara pasti memiliki ideologi, apakah bersifat doktriner, pragmatis atau jalan tengah dari keduanya, dan hal ini tercermin dalam partai yang ada di negara bersangkutan, terlepas dari keragaman definisi ideologi yang dipakai oleh setiap partai politik.⁵

Karena itulah Ramlan Surbakti merumuskan partai politik sebagai Kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pepaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Dari sinilah kemudian muncul istilah partai Islam, atau partai yang dilandaskan pada symbol-simbol Islam, penganut Islam maupun substansi ajaran Islam. Indonesia sebagai negara yang

⁵ Dalam masyarakat kontemporer mana pun, kehadiran sebuah ideologi tak dapat dielakkan lagi. Karena masyarakat politis: tanpa ideologi sama saja dengan suatu masyarakat tanpa konflik dan suatu bangsa tanpa harapan. R. William Liddle, "Modenizing Indonesian Politics," dalam R. William Liddle (peny.), *Political Participation in Modern Indonesia*, New Haven, Conn: Yale University Southeast Asian Studies, 1973, hlm. 177.

⁶ Ramlan Surbakti, op.cil., hlm. 116. Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 209

mayoritas penduduknya muslim tak bisa mengelakkan dengan menjamurnya partai-partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, baik yang secara tekstual maupun substansial.

Untuk itu format dan bentuk partai Islam perlu dirumuskan baik sebagai kontekstualisasi ajaran Islam maupun sebagai sumbangan Islam terhadap perkembangan politik di Indonesia.

C. Peran Kyai dalam Partai Politik Islam

Di tengah masyarakat Indonesia, tokoh agama atau kyai adalah sosok manusia yang disegani, dihormati, dan kadang ditakuti. Rasa segan, hormat, dan takut masyarakat itu tercipta karena kiai mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan damai di daerahnya. Bahkan seringkali mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Malah penghormatan masyarakat tidak saja kepada sang kiai tetapi juga kepada anak kiai dan keluarganya. Lucunya posisi dalam strata sosial seperti ini dibaca secara cerdas dan dimanfaatkan secara maksimal oleh anak kiai dalam bersikap kepada masyarakat. Persoalan kemudian muncul, karena kadang-kadang anak kiai bersikap dan berperilaku “lebih kiai ketimbang kiainya” itu sendiri.

Bisa saja membahasakan secara lebih terhormat bahwa seseorang menjadi kiai itu karena dipaksa sejarah. Artinya sejarah menghendaki agar dia menjadi seorang kiai. Untuk itu kita bisa cek kepada nurani masing-masing kiai, apakah mereka memang pernah bercita-cita menjadi kiai, atau berapa persen kiai yang dulunya bercita-cita menjadi kiai. Bisa juga, menjadi kiai itu bukan dipaksa sejarah, tetapi merupakan kecelakaan sejarah.

Kiai politik bisa saja berbeda secara diametral dengan politik kiai. Mungkin saja seorang kiai politik sedang menjalankan misi politik

kiai. Tetapi mungkin juga kiai politik lepas sama sekali dengan politik kiai. Misi ke-kiai-annya hilang karena ada kepentingan lain yang lebih menguntungkan, biasanya secara material. Kalau sudah sampai persoalan ini, maka semua tergantung kepada individu masing-masing kiai.⁷

Dalam konteks ini, memposisikan kiai hanya sebagai penjaga dan pengawal moral bangsa tampaknya terlalu sederhana. Namun kiai tidak sebatas pada urusan moralitas semata. Kiai adalah manusia juga. Sebab kiai memang macam-macam dan macam-macam pula politiknya.

Politik kiai dalam konteks ini bukan politik dalam pengertian partisan, yang tidak lebih dari sekadar berebut kursi dan kekuasaan, siapa memperoleh apa dengan cara bagaimana dan kapan, yang seringkali menimbulkan konflik. Politik kiai adalah politik dalam pengertian yang lebih luas, politik kebangsaan, politik bagaimana mengarifi kehidupan yang plural. Sehingga doktrin kiai adalah *tasamuh, tawazun, dan ta'adul*.⁸ Politik kiai bukan siapa menguasai siapa dan siapa menguasai apa. Politik kiai adalah politik yang santun terhadap pluralitas.

Sayangnya, doktrin politik kiai yang *tasamuh, tawazun, dan ta'adul* sering dimanfaatkan oleh kiai politik dan politisi pada umumnya untuk lebih memperkuat basis legitimasinya. Kasus pilkada di beberapa daerah menegaskan realitas tersebut. Lebih sayang lagi,

⁷Imam Yahya, *Gerakan Politik Pesantren, Peran Kyai Mranggen dalam Politik Pasca Reformasi* (Semarang: Puslit IAIN, 2004).

⁸KH Said Aqil Siradj, *Politik Kyai* dalam www.said-aqil.com

setelah legitimasi diperoleh, kiai ditinggalkan begitu saja. Tetapi namanya kiai, tetap berjiwa besar dan tidak mendendam.⁹

Sejarah mengatakan pada waktu Belanda datang untuk menjajah Indonesia, mereka mendapat perlawanan dari penguasa dan ulama atau kiai. Dalam perjalanan sejarah kemudian, Belanda mampu mengkonsolidasikan penguasa dengan mengadakan persekutuan bersama sebagian putra mahkota dan mengganti sebagian yang lain. Belanda sudah mulai ikut campur dalam penentuan pengangkatan putra mahkota. Yang berarti sudah bisa menguasai pengaruh penguasa setempat.

Sedangkan terhadap ulama, Belanda tidak bisa menguasainya. Mereka (ulama) membangun masjid-masjid dan pesantren-pesantren di pedesaan yang pada umumnya jauh dari keramaian pusat kerajaan.¹⁰

Pesantren yang mereka dirikan bukan saja sebagai pusat untuk mempelajari ajaran agama (Islam), namun sekaligus sebagai pusat latihan dan pengembangan mental untuk melawan penjajah.

⁹Kasus pemilihan Bupati di Bangkalan Madura yang controversial telah menghantarkan Kyai Haji Fuad Amin yang masih cucu KH. Kholil Bangkalan Madura, Kyai kesohor di Jawa abad ke-19 M. Beliau juga pernah menjadi anggota FKB DPRRI. Rozaki, Abdul M.Si., *Menabur Kharisma Menuai Kekusaan Kiprah Kyai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Jogyakarta: Pustaka Marwa, 2004).

¹⁰Islam sebagaimana difahami oleh Hodgson dalam bukunya; *The Ventur of Islam*; membagi tiga bentuk kajian Islam: *Pertama*, Islamic atau Islamic, yaitu kajian Islam yang menitikberatkan pada ilmu-ilmu ke-Islaman dalam dataran teori belaka. Kajian ini lebih ditekankan untuk pengembangan ilmu-ilmu ke-Islaman. *Kedua*, Islamicate, yakni kajian Islam terhadap hasil kebudayaan Islam yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan atau Islam klasik. *Ketiga*, Islamdom, ialah kajian Islam yang menitikberatkan kepada bentuk-bentuk negara Islam atau negara yang berdasar atau berprinsip pada nilai-nilai ajaran Islam. Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, Vol. 1, hal.86

Dengan pesantrennya itu, para kiai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan sekaligus dijadikan panutan, bahkan tidak jarang yang melebihi porsi secara umum, yaitu bukan saja panutan dalam masalah kehidupan keagamaan, namun dalam hampir semua permasalahan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tepat jika kiai disebut sebagai pewaris para nabi. Karenanya seorang kiai perlu berdiri di atas semua golongan.

1. Politik Kyai di Indonesia

Bahasan tentang kyai di tengah politik orde baru tidak bisa lepas dari peran para kyai dalam mendukung partai politik pada masa orde baru. Kyai sebagai sentral figur di pesantren mempunyai peran penting tidak saja bagi civitas akademika pesantren tetapi juga masyarakat sekitar yang sehari-harinya bergaul dengan masyarakat pesantren. Seringkali kyai pesantren menjadi bahan perebutan antar elite partai dalam memenangkan pemilu pada masa orde baru.

Kyai tidak saja sebagai *cultural broker* sebagaimana disinyalir oleh Geertz,¹¹ tetapi kyai juga bisa menjadi *political activities*. Karena sesungguhnya aktifitas politik merupakan bagian dari dakwah yang bisa dilakukan oleh seorang kyai di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka bisa menjadi symbol moral dalam melaksanakan tugas-tugas politik yang oleh banyak pihak disinyalir banyak terjadi kecurangan dan kelemahan.

Sayangnya, fungsi-fungsi budaya dan politik itu kebanyakan hanya menjadi lipstik yang terlihat cantik di permukaan. Para ulama' yang berjuang di jalur politik, kebanyakan hanya sibuk mengurus pengikutnya sendiri dan memenangkan partainya sendiri di arena Pemilu. Begitu juga, orang-orang yang menjadi perantara budaya,

¹¹ Geertz, Clifford *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT Pustaka Jaya, 1983).

akhirnya juga banyak yang hanya menjadi corong membenar kebijakan pemerintah.

Ulama' yang hanya diam ketika terjadi kemungkaran di hadapannya, menurut al-Ghazali digolongkan sebagai *ulama al-su'* (ulama dunia). Ulama jenis ini, biasanya bila berbicara atau mengeluarkan fatwa hanya sekedar basa-basi atau pengguguran tugasnya saja, agar dia tetap dianggap kompeten di bidangnya. Jarang sekali, fatwa yang diberikan betul-betul keluar dari hati nurani dan berniat membela rakyat yang tertindas. Terhadap fenomena politik, aktifitas dan suara kyai yang aktif di politik sangat dinanti masyarakat.

Sebetulnya aktifitas para kyai dalam dunia politik, lebih bersifat *fiqih oriented* yang menekankan pada *dakwah bil bal*.¹² Mereka akan buka suara sekeras-kerasnya dalam rangka menyampaikan amar makruf nahi munkar. Dalam persoalan wajib atau tidak mengikuti pemilihan umum legislatif dan pilpres, para ulama mendasarkan pada kaidah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahwa waajib*.¹³ Pemilihan umum adalah jembatan dalam memilih pemimpin dalam pemerintahan, sementara taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban atas dasar teologis. Oleh karena itu dengan sendirinya pemilu adalah wajib hukumnya.

Persoalan pemimpin mereka nantinya bisa bersikap adil atau tidak itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seorang pemimpin negara, seperti yang disebutkan dalam kaidah lain; *tasharruful imaam ala*

¹² M Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) hal. 58

¹³ Nadawi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994). Atau dalam buku fiqh siyasah Imam Al-Mawardi, *Kitab al-Abkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar Fikr, Tt)

al-raiyyah manutun bi al-maslahah.¹⁴ Kewajiban pemilih hanya sampai memilih pemimpin yang adil dan kompeten.

Bila dilihat secara normatif berpolitik merupakan salah satu bentuk realisasi keIslaman seseorang. *Pertama* dari aspek *dakwah bil hal*, berpolitik menempati urutan yang penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di era negara bangsa (*nation state*) sekarang ini kehidupan di tengah masyarakat tidak bisa lepas dari perilaku politik. Berbagai kebijakan pemerintahan dari tingkat RT hingga tingkat kenegaraan, merupakan hasil kesepakatan yang diperoleh oleh lembaga politik. Oleh karena itu berpolitik merupakan salah satu upaya memasuki jaringan kekuasaan dan pemerintahan. Paling tidak lewat politik, umat Islam bisa ikut serta menentukan konsep dan perilaku kemasyarakatan dalam bentuk kebijakan publik.

Kedua, dalam fiqh siyasah dinyatakan bahwa persoalan yang pertama muncul setelah Nabi Muhammad meninggal dunia adalah persoalan politik kenegaraan atau khilafah. Siapa yang akan menggantikan Nabi baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala agama. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa persoalan khilafah mempunyai kedudukan penting sebagai pengganti kenabian dengan fungsinya untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia (*keharatsa al-diin wa siyasah al-duniya*).¹⁵

Lanjut Al-Mawardi, khilafah dapat dijalankan manakala ada ketaatan dari umat kepada pemimpinnya, Rasulullah dan Allah SWT. Dasar ini yang kemudian diterjemahkan oleh para nahdliyyin untuk senantiasa mengikuti segala perilaku kyai pesantren baik persoalan politik, sosial dan kemasyarakatan. Ketaatan kepada kyai yang

¹⁴*Ibid*

¹⁵Imam Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hal 5.

kebetulan menjadi pemimpin partai politik menjadi momentum untuk mengamalkan teks ajaran tentang khilafah atau imamah.

2. *Arus Utama Politik Kyai*

Para ulama' sudah selayaknya konsisten dengan fungsinya sebagai penjaga moral dan alat kontrol terhadap kekuasaan. Misi utama kyai adalah di lembaga pesantren, madrasah, dan sekolah, serta masyarakat pada umumnya guna membangun peradaban modern yang humanistik. Mereka harus bisamenjadi *rahmatan lil alamin*, yakni rahmat bagi seluruh masyarakatnya tanpa memandang golongan, suku dan agama. Termasuk didalamnya kaum tertindas dan orang-orang yang selama ini terhinakan, baik oleh struktur kekuasaan atau pemahaman keagamaan yang sempit. Perjuangan lewat jalur kekuasaan yang dilakukan oleh para politisi, sudah semestinya disinergikan dengan perjuangan budaya dan keadilan sosial yang dilakukan oleh para ulama'.

Dalam membangun sebuah peradaban ini, menurut KH. Mustofa Bisri, para ulama' sudah semestinya menjaga jarak dengan kekuasaan.¹⁶ Dengan begitu, mereka akan lebih kuat dari kekuasaan dan tidak akan menghegemoni kekuasaan demi ambisi pribadinya. Mereka tentu akan lebih leluasa membangun nilai dan pranata yang akan dianut oleh masyarakat. Bukan malah sebaliknya, menjadikan masyarakat sebagai pengikut yang dimanfaatkan untuk mendukung calon atau partai yang dianut sesuai subyektifitasnya.

Sebagai pewaris Nabi dan orang yang tertanam akarnya di masyarakat, para ulama' dengan semestinya memainkan diri sebagai

¹⁶ Saiful Amin Sholihin, *Tokoh Agama dan Pilihan Politik* (www.islamlib.com), diakses 22/2/2004.

figur moral, anutan publik, berwatak sosial, serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran ulama sebagai *penegak peradaban*- meminjam istilah Gus Mus – akan betul-betul membumi di masyarakat. Intelektual organik semacam itulah, yang akan memberikan pencerahan dan keoptimisan bangsa ini ke depan.

Di masa lampau, peran pondok pesantren mendapat perhatian serius dari para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka tertarik dengan eksistensi dan peran sosial pondok pesantren. Sebut saja misalnya Hiroko Horikoshi yang mengamati peranan mending Ajengan/Kiai Yusuf Tojiri, yang mendirikan dan memimpin Pondok pesantren Cipari (Wanaraja, Garut). Bagi Horikoshi Kyai bukanlah “makelar budaya” sebagaimana diteorikan oleh Clifford Geertz.. Dalam disertasinya, Horikoshi berpendapat bahwa Kyai mempunyai "peranan budaya". Horikoshi menunjukkan "kebalikan" teori "makelar budaya" (cultural broker) Clifford Geertz dalam proses pembangunan. Kesimpulan ini didapatkan Horikoshi melalui kajian empiris yang mempunyai nilai tersendiri setelah sekian lama tinggal di pondok pesantren tersebut.¹⁷

Temuan Horikoshi menyatakan bahwa kiai bukanlah bendungan tinggi yang memiliki peranan pasif, melainkan justru menjadi "*agent social of Change*" dengan memilih sendiri mana yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat dan mana yang tidak.

Menurut Clifford Geertz, peranan "makelar budaya" itu menunjukkan bahwa para kiai berperan bagaikan sebuah bendungan yang "menampung" begitu banyak manifestasi (kehadiran) budaya baru, dan melepas sebagian dari begitu banyak manifestasi budaya

¹⁷ Sebagaimana dikutip Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im (eds), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, 1989) hal. 81-96.

baru tersebut.¹⁸ Karena demikian banyak hal di luar kendali pondok pesantren, akhirnya budaya itu langsung "ditelan" masyarakat. Kebuntuan melakukan peran "makelar budaya" tersebut pada akhirnya akan "mematikan" pemeran budaya itu juga.

Untuk melihat peranan budaya itu, antara lain, dalam "perencanaan arsitektural" pondok-pondok pesantren pada masa lampau. Pesantren Futuhiyyah Mranggen misalnya, yang terletak di pinggiran kota Semarang, yang dahulu didirikan pada tahun 1901 oleh almarhum KH Abdurrahman bin Qoshidil Haq, tersebut dimulai dengan gapura di samping pusat pasar Mranggen Kabupaten Demak.¹⁹ Di tengah komplek pesantren berdiri Masjid sebagai pusat studi dan pelayanan masyarakat. Di sebelah utara, berdiri kamar-kamar para santri. Dan sekarang di kanan kiri Masjid bangunan kamar-kamar santri dan sekolah-sekolah di bawah yayasan Futuhiyyah.

Gambaran di atas, --meminjam istilah KH Abdurrahman Wahid-- merupakan sebagai bentuk partisipasi pondok pesantren secara aktif dalam mengambil perencanaannya, yakni mengikuti simbol budaya Jawa yang berlandaskan pada pagelaran wayang. Para santri adalah mereka yang berada di perjalanan menuju ke arah "kesempurnaan pandangan". Kesempurnaan ilmu agama yang akan menjadi *way of life* dalam mengarungi bahtera kehidupan di masyarakat kelak kemudian hari.

Proses belajar dan mengajar di lingkungan pondok pesantren bukanlah sekadar *transfer of Islamic science*, menguasai ilmu-ilmu

¹⁸ Geertz, Clifford *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT Pustaka Jaya, 1983) hal.3-5.

¹⁹ Prie GS Abdul Jabbar, *Sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen* (Demak: Team Panitia, 2001).

keagamaan, melainkan juga proses pembentukan pandangan hidup dan perilaku para santri itu nantinya setelah kembali ke masyarakat. Sebaliknya, para kiai adalah mereka yang telah memiliki kesempurnaan pandangan. Dalam pengertian tasawuf, masjid pesantren yang terletak di tengah-tengah antara keduanya merupakan tempat pertempuran moral berlangsung di antara para salikun, yang akan diubah perilakunya oleh *washilun*.²⁰

Disadari atau tidak, pesantren telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan, khususnya dalam pembentukan watak yang bermoral spiritual. Hal ini karena pesantren identik dengan 'bengkel akhlak' yang kemudian berbanding lurus dengan asumsi bahwa seorang lulusan pesantren digeneralisasi sebagai sosok yang berbudi luhur dan mumpuni dalam ilmu-ilmu keagamaan, khususnya Islam.

3. Peran Politik Kenegaraan

Menurut studi kajian timur tengah,²¹ sebelum dan sesudah berhasil menumbangkan rezim Shah Iran di tahun 1979, mendiang Imam Khomeini adalah seorang tokoh agama (ulama), mujtahid (pembaharu pemikiran), *marja' al-taqlid* (seorang yang patut diikuti), sekaligus seorang politisi yang dikagumi dan dihormati masyarakat Iran. Khomeini menuliskan gagasan dan doktrin politik sejak tahun 1941 dalam bukunya berjudul *Kasyf al-Asrar*.

Di berbagai pidato politiknya, Imam Khomeini dengan tegas meminta agar Shah Iran mengundurkan diri dari jabatannya. Saat Shah Iran membuat kebijakan *land-reform* di tahun 1963, dengan tegas Imam

²⁰ Abdurrahman Wahid, Pesantren Sebagai Subkultur, dalam M Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 40-60

²¹ Satrio Arismunandar, *Posisi Gerakan Gerakan Islam di Timur Tengah* (Jurnal Islamika, No. 4 April-Juni 1991, hal.87-92.

Khameini melakukan gerakan perlawanan, meski akhirnya ia harus meninggalkan Iran menuju Turki (1964), Irak (1964-1978), dan Prancis sejak tahun 1978. Di ketiga negara itu, Imam Khameini meneruskan perjuangannya melawan rezim Shah Iran.

Begitu pula dalam kaitannya dengan peran politik tokoh agama yang ada di dalam negeri. Ini bisa dilihat dari peran sosial politik Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial yang pernah berpolitik praktis. Di masa revolusi kemerdekaan, para tokoh agama dari NU membuat langkah *political power* dengan membentuk tiga kelompok barisan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Barisan Hizbullah dipimpin K.H. Zainul Arifin, Barisan Sabilillah dipimpin K.H. Masykur, dan Barisan Mujahidin dipimpin K.H. Wahab Hasbullah.²²

Saat memilih aktif di jalur parpol, tokoh agama dari NU juga membuat beberapa catatan gemilang. Menteri Dalam Negeri dari NU, Mr. Soenarjo membuat kebijakan pembentukan panitia Pemilu pertama yang terdiri dari perwakilan parpol. Menteri Ekonomi dari NU, Rahmat Mulyoamiseno membatasi aktivitas ekonomi pengusaha asing, serta memproteksi dan mengembangkan pengusaha pribumi.

Di bidang keagamaan dan pendidikan, tokoh NU juga sangat berperan, seperti pembangunan Masjid Istiqlal di masa Menteri Agama (Menag) K.H. Abdul Wahid Hasyim, pendirian IAIN oleh Menag K.H. Wahib Wahab, realisasi penerjemahan Alqur'an edisi bahasa Indonesia oleh Menag Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, dan penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) oleh Menag K.H. Muhammad Dahlan.²³

²² Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Solo: Jatayu, 1985).

²³ Ibid

Begitu pula penerimaan tokoh-tokoh agama atas bentuk final negara kesatuan berasaskan Pancasila, tentunya juga tidak bisa dianggap sebagai peristiwa politik yang sepele. Semua itu adalah bentuk pengabdian para tokoh agama yang tulus, tanpa pamrih, tanpa tendensi, kecuali untuk menegakkan kebenaran, dan menghilangkan penindasan. Padahal, semua itu bermula dari keterlibatan di dunia politik praktis.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penjelasan di atas, sebagai berikut:

Di kalangan masyarakat Pesantren, politik itu bukan hanya sebagai seni untuk memimpin, tetapi politik itu adalah upaya untuk mengatur persoalan dunia sekaligus ibadah mempersiapkan masa depan di akhirat. Untuk itu segala perilaku politik didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah fiqh, sebuah nilai legalitas formal yang dipegangi oleh para Kyai Pesantren.

Mendirikan partai politik adalah sebuah kewajiban syar'i, karena aturan dalam syariat Islam berpolitik adalah sebuah kewajiban. Dengan berpegang pada kaidah "mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib", (segala sesuatu yang menjadi prasyarat bagi sempurnanya sebuah kewajiban maka hukumnya wajib) maka mendirikan partai politik dan berpartisipasi dalam politik juga menjadi sebuah kewajiban.

Di pesantren, patron-klin antara kyai-santri didasarkan pada pendekatan tasawwuf, di mana kyai adalah seorang mursyid yang harus ditaati oleh santrinya. Relasi ini tidak serta merta diterapkan dalam pola hubungan politik yang fiqh sentris, di mana pilihan seorang kyai dalam berpolitik harus diikuti secara mutlak oleh para kyai atau santri yang ada dalam bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid Dkk, *Politik demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, , Editor: Andito (Abu Zahra); Pengantar: Eep Saefulloh Fatah (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999).
- Abdurrahman, Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, penyunting Muh Saleh Isre (Jogyakarta: LKiS, 1999)
- Abdurrahman, Wahid,, *Pesantren Sebagai Subkultur*, dalam M Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaruan* (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tarikh al-Thabari Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1988)
- Abi Ya'la Muhammad al-Farra, *Abkam al-Sultaniyah* [Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H]
- Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta: Puslit IAIN Jakarta, 1999).
- BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004,
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Ibn Taimiyah *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Raiyyah* [Beirut: Dar al-Katib al-Arabi, tt.]
- Imam Yahya, *Gerakan Politik Pesantren , Peran Kyai Mranggen dalam Politik Pasca Reformasi* (Semarang: Puslit IAIN, 2004).
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1999).
- Mawardi, Abi Hasan Ali, *Adabu al-Dunia wa al-Diin* [Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/ 1415 H],
- Mawardi, Abi Hasan Ali, *Kitab Al-Abkam al-Sulthaniyah wa Al-wilayat al-Diniyyah* [Beirut: Dar al-Fikr, 1960 M/ 1380 H],
- 204 | *H. Imam Yahya, Demokrasi Pesantren : Menebar Format*

- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru* [Jakarta: INIS, 1994].
- PJ.Bouman, *Sosilogi, Pengertian dan Masalah*, terj. Sugito dan Sujitno, Jakarta: Yayasan Pendidikan Masyarakat, 1959,
- R. William Liddle, "Modenizing Indonesian Politics," dalam R.William Liddle (peny.), *Political Participation in Modern Indonesia*, New Haven, Conn: Yale University Southeast Asian Studies, 1973.
- Robert Mac Iver, *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1955,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Dan Politik*, cet ke 2. Bandung: PT. Eresco, 1981.